

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB. PADANG PANJANG DAN KAB. MAGELANG TAHUN 2019-2020

Aprilia Fauziah¹, Hera Sapitri², Muhammad Syawal³, Putri Ramadhani Br Sembiring⁴, Sutriana⁵.

Program Studi Akuntansi, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

Penulis Korespondensi: msyawallll1104@gmail.com

Received: 03-06-2024

Revised: 12-06-2024

Approved: 22-06-2024

ABSTRACT

Analysis of the financial performance of the Regional Governments of Padang Panjang Regency and Magelang Regency in 2019-2020 was carried out to evaluate differences in budget realization, financial performance ratios, efficiency and financial effectiveness between the two regions. The method used in this analysis uses a comparative theory approach to compare financial performance between Padang Panjang Regency and Magelang Regency. In this analysis, a conceptual framework is used that considers important aspects such as budget realization, financial performance ratios, effectiveness and efficiency of regional government financial management. Findings show a significant increase in the effectiveness of local revenue (PAD) in Padang Panjang Regency in 2020, while the Regency Magelang recorded a surplus. Analysis of financial efficiency ratios and operational reports also highlights differences in the presentation of Regional Government Financial Reports between the two districts.

Keywords: *Analysis of Financial Reports, Regional Government, Financial Efficiency, Financial Effectiveness, Budget Realization.*

ABSTRAK

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Panjang dan Kabupaten Magelang tahun 2019-2020 dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan dalam realisasi anggaran, rasio kinerja keuangan, efisiensi, dan efektivitas keuangan antara kedua daerah. Metode yang digunakan dalam analisis ini menggunakan pendekatan teori komperatif untuk membandingkan kinerja keuangan antara Kabupaten Padang Panjang dan Kabupaten Magelang. Dalam analisis ini, digunakan kerangka konseptual yang mempertimbangkan aspek penting seperti realisasi anggaran, rasio kinerja keuangan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Temuan menunjukkan peningkatan signifikan dalam efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Panjang pada tahun 2020, sementara Kabupaten Magelang mencatat surplus. Analisis rasio efisiensi keuangan dan laporan operasional juga menyoroti perbedaan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara kedua kabupaten.

Kata Kunci: *Analisis Laporan Keuangan, Efisiensi Keuangan, Efektivitas Keuangan, Realisasi Anggaran.*

PENDAHULUAN

Daerah otonom dan otonomi daerah adalah istilah untuk menyebut daerah yang memiliki kewenangan mengatur urusannya sendiri. Pengertian daerah otonom berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 23/2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dari daerah otonom ini dapat berupa provinsi, kota, dan kabupaten.

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam konteks otonomi daerah dan pengelolaan keuangan yang efektif, selain itu

perbandingan kinerja keuangan antar entitas pemerintah sangatlah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas daerah.

Dalam hal ini setiap daerah atau Pemda kebutuhan dan pendapatannya berbeda. Jadi anggaran yang di berikan pemerintah pusat kepada setiap daerah juga berbeda. Seperti di kab Magelang dan Padang panjang anggaran yang di berikan oleh pemerintah pusat terhadap kedua daerah ini berbeda karena adanya perbedaan kebutuhan di Pemdanya sendiri, Sehingga penyajian di LKPD serta unsur-unsur di LRA, LO serta neraca bisa berbeda nama akun dan rinciannya.

Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan teori komperatif, yang memungkinkan perbandingan kinerja keuangan antara dua entitas berbeda, yaitu Kabupaten Padang Panjang dan Kabupaten Magelang. Teori komperatif ini memungkinkan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam kinerja keuangan kedua pemerintah daerah tersebut, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan mereka.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam analisis laporan keuangan ini akan mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti realisasi anggaran, rasio kinerja keuangan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan kerangka konseptual yang kokoh, analisis ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja keuangan Kabupaten Padang Panjang dan Kabupaten Magelang, serta memungkinkan untuk melakukan perbandingan yang lebih terperinci antara kedua entitas tersebut.

Tujuan analisis adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Panjang dan Kabupaten Magelang pada tahun 2019-2020, dengan fokus pada perbandingan realisasi anggaran, rasio kinerja keuangan, efisiensi, dan efektivitas keuangan antara kedua daerah. Analisis dilakukan untuk menilai peningkatan atau penurunan kinerja keuangan serta perbedaan dalam pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Kabupaten Padang Panjang dan Kabupaten Magelang. Selain itu, analisis juga mencakup perbandingan laporan keuangan dan operasional antara kedua kabupaten untuk menyoroti perbedaan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

METODE PENELITIAN

Data penelitian ini dikumpulkan di Kabupaten Padang Panjang dan Kabupaten Magelang oleh BPPKAD Kabupaten Padang Panjang dan Kabupaten Magelang yang membawahi bagian keuangan pemerintah Kabupaten Padang Panjang dan Kabupaten Magelang. Deskripsi subjek yang sistematis, faktual, dan aktual adalah tujuan dari penelitian ini, yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Panjang dan Kabupaten Magelang tahun 2019-2020.

PEMBAHASAN

A. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Padang Panjang

1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berisi perincian tentang anggaran entitas pelaporan serta realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,

surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan. Pengguna laporan dapat menggunakan data ini untuk menilai keputusan yang dibuat untuk menilai keputusan yang dibuat tentang distribusi pendanaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan terkait dengan total realisasi anggaran, yang membantu dalam menilai kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Berikut data mengenai laporan realisasi dan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Padang Panjang Tahun 2019.

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Panjang 2019

Uraian	2019	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	87.837.855.572,00	77.323.150.456,49
Dana Perimbangan	481.941.173.000,00	453.085.922.598,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	30.645.211.737,00	47.928.065.893,00
Jumlah Pendapatan	600.424.240.309,00	578.337.138.947,49
Belanja Tidak Langsung	278.962.745.453,75	501.449.551.791,35
Belanja Langsung	390.371.176.278,85	98.188.781.547,97
Jumlah Belanja	669.333.921.732,60	599.638.333.339,32
Surplus/(Defisit)	(68.909.681.423,60)	(21.867.123.803,83)
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	68.909.681.423,60	68.909.681.423,60
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	68.909.681.423,60	68.909.681.423,60
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	47.042.557.619,77

Pendapatan asli daerah yang direncanakan Rp 87.837.855.572,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 77.323.150.456,49 atau 88,02%. Pembiayaan netto yang direncanakan sama besarnya yang dapat direalisasikan, sedangkan pembiayaan pengeluaran tidak ada anggaran yang di tetapkan dan direalisasikan. Terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar sebesar Rp 47.042.557.619,77.

Berikut data mengenai laporan realisasi dan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Padang Panjang Tahun 2019.

Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Panjang 2020

Uraian	2020	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	67.181.021.098,66	79.428.802.696,06
Dana Perimbangan	422.847.982.887,00	412.707.888.054,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	56.316.631.471,00	55.638.211.946,00
Jumlah Pendapatan	546.345.635.456,66	547.774.902.696,06
Belanja Tidak Langsung	497.913.017.626,36	463.209.886.832,97
Belanja Langsung	61.832.700.628,07	54.603.589.783,87
Jumlah Belanja	592.734.340.696,43	543.352.682.379,84
Surplus/(Defisit)	(47.042.557.619,77)	3.768.367.936,22
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	50.810.925.555,99

Pendapatan asli daerah yang direncanakan Rp 67.181.021.098,66 dapat direalisasikan sebesar Rp 79.428.802.696,06 atau 118,23%. Pembiayaan netto yang direncanakan sebesar Rp 47.042.557.619,77 dapat direalisasikan sesuai anggaran yang ada yaitu sebesar Rp 47.042.557.619,77 atau 100%, sedangkan pengeluaran netto tidak ada anggaran yang direncanakan dan direalisasikan. Terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp 50.810.925.555,99.

Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Panjang Tahun 2019-2020

Pengukuran kinerja adalah proses yang sistematis dan berkesinambungan yang menilai berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan, sasaran, dan tugas yang telah ditetapkan dalam menjalankan visi, misi, dan strategi suatu lembaga. Tujuan dari metode ini adalah untuk menilai tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja agar dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian tujuan yang efektif. Beberapa rasio keuangan digunakan untuk mencapai tujuan ini.

1. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Untuk menentukan rasio efektivitas penerimaan PAD harus menghitung realisasi Penerimaan PAD disbanding dengan target Penerimaan PAD yang direncanakan. Kemampuan pemerintah daerah untuk mentransformasikan penerimaan PAD menjadi PAD sesuai dengan tujuannya ditunjukkan oleh rasio efektivitas Penerimaan PAD. Rumus yang dikutip dari Astria (2015) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2019-2020

Rasio efektivitas 2019	=	$\frac{77.323.150.456,49}{87.837.855.572,00}$	x 100 = 88,02%
Rasio efektivitas 2020	=	$\frac{79.428.802.696,06}{67.181.021.098,66}$	x 100 = 118,23%

Dari hasil tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 88,02% yang berarti bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Padang Panjang lebih rendah dan pada tahun 2020 rasio efektivitas senilai 118,23%, mengalami kenaikan sebesar 30,21%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Padang Panjang sangat efektif.

Semakin tinggi nilai efektivitas, yaitu 100% atau lebih berarti tingkat efektivitas baik. Pada tahun 2019, kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Panjang dinilai belum efektif karena masih di bawah 100%. Akan tetapi pada tahun 2020, kinerja keuangannya dinilai sangat efektif dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan PAD bertujuan untuk menyelaraskan PAD dengan targetnya.

2. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi ditentukan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang dihasilkan. Apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%, maka kinerja pemerintahan dianggap efektif. Semakin rendah efisiensinya, maka semakin baik kinerjanya. Menurut Ratnasari (2017) rumus rasio efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2019-2020

Rasio Efisiensi 2019	=	$\frac{599.638.333.339,32}{669.333.921.732,60}$	x 100 = 89,58%
Rasio Efisiensi 2020	=	$\frac{543.352.682.379,84}{592.734.340.696,43}$	x 100 = 91,67%

Tabel di atas menunjukkan rasio efisiensi pada tahun 2019 senilai 89,58%, sedangkan pada tahun 2020 senilai 91,67%, terjadi kenaikan senilai 2,09%. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Panjang pada tahun 2019-2020 dapat dikatakan cukup efektif dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah. Hal ini terjadi karena realisasi dan

anggaran belanja seimbang, sehingga pemerintah merasa mampu melakukan rasionalisasi anggaran. Hal ini terlihat efisiensinya yang kurang dari 100%.

1.2 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Berikut merupakan penyajian atas analisis laporan operasional Kab. Padang Panjang:

Tabel 5 Laporan Operasional Kab. Padang Panjang 2019-2020

	Pendapatan		Beban	Surplus/(Defisit)
2019	586.341.719.818,49	2019	572.245.740.542,92	14.095.979.275,57
2020	546.590.002.245,06	2020	555.205.652.979,54	(8.615.650.734,48)

Dari data diatas dapat di simpulkan bahwasanya penggunaan anggaran untuk kegiatan operasional Kab. Padang Panjang pada tahun 2019 jauh lebih baik daripada tahun 2020 karena pada tahun 2020 terjadinya penggunaan yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya defisit.

Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan dalam Laporan Operasional (LO) Kab. Padang Panjang Tahun 2019-2020

1. Perbandingan 2019

- Pendapatan dalam LRA lebih rendah daripada Pendapatan LO karena belanja dalam LRA lebih tinggi daripada pendapatannya sehingga pendapatan LRA tidak dapat menutupi belanjanya. Alasan lain karena Pendapatan LO dicata menggunakan basis akrual sehingga pendapatan mungkin sudah diakui di LO sebelum benar-benar diterima secara kas yang berarti pendapatan tersebut belum muncul di LRA.
- Belanja dalam LRA lebih besar daripada Beban LO, karena adanya perbedaan waktu dalam pengakuan belanja dan beban. Belanja yang terjadi pada akhir periode tetapi belum diakui sebagai beban membuat belanja dalam LRA lebih tinggi dibandingkan beban di LO.
- Dalam LRA 2019 terjadinya defisit, sedangkan dalam LO terjadi surplus, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam basis pencatatan, pengakuan pendapatan dan belanja, serta penanganan pengeluaran modal dan utang yang menyebabkan situasi di mana LRA menunjukkan defisit sementara LO menunjukkan surplus.

2. Perbandingan 2020

- Pendapatan LRA lebih besar daripada Pendapatan LO. Pendapatan LRA menunjukkan pendapatan yang lebih besar karena banyaknya penerimaan kas yang tercatat dalam periode tersebut tetapi tidak diakui dalam Pendapatan LO.

- b. Beban dalam LO lebih besar daripada Belanja dalam LRA. Karena adanya pengakuan beban non kas seperti penyusutan. Beban ini diakui dalam LO tetapi tidak mengakibatkan pengeluaran kas langsung, sehingga tidak dicatat dalam LRA. Sehingga, total beban dalam LO lebih tinggi karena mencakup beban penyusutan yang tidak ada dalam LRA.
- c. Dalam LRA terjadi surplus sedangkan dalam LO terjadi defisit. Karena terdapatnya penerimaan kas yang banyak dari pendapatan transfer.

B. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KAB. Magelang

1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Berikut data mengenai laporan realisasi dan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Padang Panjang Tahun 2019.

Tabel 6 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 2019

Uraian	2019	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	242.424.296.000,00	273.582.932.151,00
Pendapatan Transfer	607.516.627.000,00	674.758.581.877,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	18.672.000.000,00	19.444.320.215,00
Jumlah Pendapatan	958.992.923.000,00	967.785.834.243,00
Belanja Tidak Langsung	801.616.699.000,00	722.543.715.708,00
Belanja Langsung	290.731.819.000,00	272.055.204.204,00
Jumlah Belanja	1.092.438.518.000,00	994.598.919.912,00
Surplus/(Defisit)	(134.408.800.000,00)	(27.376.285.369,00)
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	134.408.800.000,00	134.408.800.314,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	134.408.800.000,00	134.421.683.315,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	107.045.397.946,00

ah yang direncanakan Rp 242.424.296.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 273.582.932.151,00 atau 112,86%. Pembiayaan netto yang direncanakan Rp 134.408.800.000,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp 134.421.683.315,00, sedangkan pembiayaan pengeluaran tidak ada anggaran yang ditetapkan dan direalisasikan. Terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar sebesar Rp 107.045.397.946,00.

Berikut data mengenai laporan realisasi dan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Padang Panjang Tahun 2020.

Tabel 7 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 2020

Uraian	2020	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	240.421.207.000,00	290.756.816.510,00
Dana Transfer	643.980.024.000,00	635.300.826.727,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	20.667.910.000,00	20.131.118.300,00
Jumlah Pendapatan	905.069.141.000,00	946.188.761.537,00
Belanja Tidak Langsung	878.781.002.000,00	681.794.794.324,00
Belanja Langsung	129.960.536.000,00	116.558.397.390,00
Jumlah Belanja	1.008.741.538.000,00	798.353.191.714,00
Surplus/(Defisit)	(103.672.397.000,00)	147.835.569.823,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	107.045.397.000,00	107.045.397.946,00
Pengeluaran Pembiayaan	3.373.000.000,00	3.373.000.000,00
Pembiayaan Netto	103.672.397.000,00	103.672.397.946,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	251.514.967.769,00

Pendapatan asli daerah yang direncanakan Rp 240.421.207.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 290.756.816.510,00, atau 120,94%. Pembiayaan netto yang direncanakan sebesar Rp 103.672.397.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 103.672.397.946,00 atau 100%, sedangkan pengeluaran pembiayaan netto yang direncanakan sama besarnya yang dapat direalisasikan. Terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp 251.514.967.769,00.

Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2020

Pengukuran kinerja adalah proses yang sistematis dan berkesinambungan yang menilai berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan, sasaran, dan tugas yang telah ditetapkan dalam menjalankan visi, misi, dan strategi suatu lembaga. Tujuan dari metode ini adalah untuk menilai tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja agar dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian tujuan yang efektif. Beberapa rasio keuangan digunakan untuk mencapai tujuan ini.

1. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 8 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2019-2020

$\text{Rasio efektivitas 2019} = \frac{273.582.932.151,00}{242.424.296.000,00} \times 100 = 113\%$
$\text{Rasio efektivitas 2020} = \frac{290.756.816.510,00}{240.421.207.000,00} \times 100 = 121\%$

Dari hasil tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 113% yang berarti bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magelang lebih rendah dan pada tahun 2020 rasio efektivitas senilai 121%, mengalami kenaikan sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magelang sangat efektif.

Semakin tinggi nilai efektivitas, yaitu 100% atau lebih berarti tingkat efektivitas baik. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, kinerja keuangannya dinilai sangat efektif dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan PAD bertujuan untuk menyelaraskan PAD dengan targetnya.

2. Rasio efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 9 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2019-2020

$\text{Rasio Efisiensi 2019} = \frac{994.598.919.912,00}{1.092.438.518.000,00} \times 100 = 91\%$
$\text{Rasio Efisiensi 2020} = \frac{798.353.191.714,00}{1.008.741.538.000,00} \times 100 = 79\%$

Tabel di atas menunjukkan rasio efisiensi pada tahun 2019 senilai 91%, sedangkan pada tahun 2020 senilai 79%, terjadi penurunan senilai 12%. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2019-2020 dapat dikatakan kurang efektif karena masih berada dibawah 100%. Akan tetapi pada tahun 2019 lebih efektif dibandingkan pada tahun 2020 karena pada tahun 2019 lebih mendekati 100%.

1.2 Laporan Operasional

Tabel 10 Laporan Operasional Kab. Magelang Tahun 2019-2020

Pendapatan		Beban		Surplus/(Defisit)
2019	988.454.938.480,68	2019	850.895.925.177,71	137.557.233.302,97
2020	969.313.401.036,76	2020	808.140.784.728,00	160.638.187.239,48

Dari data diatas dapat di simpulkan bahwasanya penggunaan anggaran untuk kegiatan operasional Kab. Magelang pada tahun 2020 jauh lebih baik daripada tahun 2019 karena pada tahun 2020 penggunaan anggaran untuk kegiatan operasional dapat dikelola dengan baik, jauh daripada tahun 2019.

Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan dalam Laporan Operasional (LO) Kab. Magelang Tahun 2020

- a. Pendapatan dalam LRA lebih rendah daripada Pendapatan LO karena belanja dalam LRA lebih tinggi daripada pendapatannya sehingga pendapatan LRA tidak dapat menutupi belanjanya. Alasan lain karena Pendapatan LO dicata menggunakan basis akrual sehingga pendapatan mungkin sudah diakui di LO sebelum benar-benar diterima secara kas yang berarti pendapatan tersebut belum muncul di LRA.
- b. Beban dalam LO lebih besar daripada Belanja dalam LRA. Karena adanya pengakuan beban non kas seperti penyusutan dan amortisasi. Beban ini diakui dalam LO tetapi tidak mengakibatkan pengeluaran kas langsung, sehingga tidak dicatat dalam LRA. Sehingga, total beban dalam LO lebih tinggi karena mencakup beban penyusutan yang tidak ada dalam LRA.
- c. Surplus di LO lebih besar daripada surplus di LRA, karena LO mencakup lebih banyak elemen pendapatan dan beban yang diakui secara akrual, sementara LRA hanya mencatat transaksi kas, yang dapat menghasilkan perbedaan signifikan sehingga menyebabkan surplus LO lebih tinggi daripada surplus LRA.

C. Perbandingan LKPD Kab. Padang Panjang dan Kab. Magelang

1. Urutan Penyajian

Urutan penyajian LKPD menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 pada Kota Padang Panjang dan Kota Magelang.

Kota Padang Panjang	Kota Magelang
LRA (Laporan Realisasi Anggran)	LRA (Laporan Realisasi Anggran)
LPSAL (Laporan Perubahan Saldo Anaggaran Lebih)	LPSAL (Laporan Perubahan Saldo Anaggaran Lebih)
Neraca	Neraca
LO (Laporan Oprasional)	LO (Laporan Oprasional)
LAK (Laporan Arus Kas)	LAK (Laporan Arus Kas)
LPE (Laporan Peruabahan Ekuitas)	LPE (Laporan Peruabahan Ekuitas)
CALK (Catatan Arus Laporan Keuangan)	CALK (Catatan Arus Laporan Keuangan)

2. Komponen Dalam LKPD

Perbandingan komponen LKPD diperlukan untuk mengetahui kelengkapan atau jumlah akun yang disajikan dalam LKPD. Berikut ini adalah perbandingan LKPD pada pemda Kota Padang Panjang tahun 2020 dengan pemda kota magelang tahun 2020.

a. Perbandingan Akun Dalam Neraca

Pemda	Aset Lancar	Aset Tetap
Padang Panjang	Kas Di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas lainnya (dana BOS), setara kas, piutang pajak daerah, penyisihan piutang pajak taktertagih, piutang retribusi daerah, penyisihan piutang retribusi taktertagih, piutang dana bagi hasil, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tak tertaagih, piutang lain-lain PAD yang sah, penyisihan piutang lain-lain yang sah tak tertagih, piutang lain-lain tak tertagih, persediaan, biaya dibayar dimuka.	Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, akumulasi penyusutan.
Magelang	Kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di badan layanan umum daerah, kas di bendahara BOS, kas lainnya, piutang pendapatan, penyisihan piutang pendapatan, piutang lainnya, penyisihan piutang lainnya, beban dibayar di muka, persediaan.	Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, akumulasi penyusutan.

Jumlah Akun Kas	Padang Panjang (5)	Magelang (6)
	Kas Di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas lainnya (dana BOS), setara kas,	Kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di badan layanan umum daerah, kas di bendahara BOS, kas lainnya.

Kenaikan / (Penurunan) antara tahun 2019 dan 2020		
	Padang Panjang	Magelang
Aset Lancar	1.502.873.553,57	169.680.799.434,41
Investasi Jangka Panjang	19.999.520,72	(4.888.908.816,91)
Aset Tetap	(695.828.025,3)	(46.126.160.068,92)
Kewajiban	(5.274.471.022,87)	532.408.956,00

Format dan jumlah kolom antara LKPD Padang Panjang dan Magelang adalah sama

b. Perbandingan Akun Dalam LRA

PENDAPATAN			
	Anggaran	Realisasi	Selisih (%)
Padang Panjang	546.345.635.456,66	547.774.902.696,06	100,26
Magelang	905.069.141.000,00	946.188.761.537,00	104,54

BELANJA			
	Anggaran	Realisasi	Selisih (%)
Padang Panjang	592.734.340.696,43	543.352.682.379,84	91,67
Magelang	1.008.741.538.000,00	798.353.191.714,00	79,14

PEMBIAYAAN				
		Anggaran	Realisasi	Selisih (%)
Penerimaan	Padang Panjang	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00
	Magelang	107.045.397.000,00	107.045.397.946,00	100,01
Pengeluaran	Padang Panjang	0,00	0,00	100,00
	Magelang	3.373.000.000,00	3.373.000.000,00	100,00

SILPA		
	Anggaran	Realisasi
Padang Panjang	0,00	50.810.925.555,99
Magelang	0,00	251.514.967.769,00

c. Perbandingan akun dalam LO

	Surplus/Defisit	2020	2019
Padang Panjang	Defisit	8.615.650.734,48	14.095.979.275,57
Magelang	Surplus	160.638.187.239,48	137.557.233.302,97

d. Perbandingan LO dan LRA

LRA VS LO			
	Pendapatan LRA	Pendapatan LO	Keterangan
Padang Panjang	547.774.902.696,06	546.590.002.245,06	LRA > LO
Magelang	946.188.761.537,00	969.313.401.036,76	LRA < LO
	Belanja LRA	Beban LO	Keterangan
Padang Panjang	543.352.682.379,84	555.205.652.979,54	LRA < LO
Magelang	798.353.191.714,00	808.140.784.728,00	LRA < LO

e. Perbandingan format dan substansi CaLK

Dalam penyajian CaLK tidak memiliki format yang baku. Sehingga terdapat perbedaan penyajian antara Padang Panjang dan Magelang, diantaranya:

1. Cara penomoran CaLK yang menjadi referensi atau catatan dalam LKPD utama khususnya Neraca, LRA dan LO yang membutuhkan Penjelasan lebih rinci dalam CaLK.
 - Cara penomoran di Padang Panjang: E.1.a, E.1.b, E.1.c, E.1.d, dan seterusnya.
 - Cara penomoran di Magelang : S. 1.a, S.1. b, S.1.c, S.1.d, dan seterusnya.
2. Cara penyajian informasi dalam CaLK, dimana ada yang memasukkan kebijakan akuntansi untuk setiap akun dan membuat rincian akun beserta nilai rupiahnya.

CaLK berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran (LRA, LO, LPE, dan Neraca) CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan informasi yang digunakan oleh setiap entitas pelaporan, setiap akun harus dilengkapi dengan rincian akun beserta nilai rupiahnya. Dengan demikian, CaLK berfungsi sebagai penjelasan naratif yang lengkap dan akurat serta mencakup kebijakan akuntansi yang dipergunakan, rincian akun, dan data yang relevan untuk memastikan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan analisis rasio kinerja keuangan antara Kabupaten Padang Panjang dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Kabupaten Magelang memiliki rasio realisasi pendapatan yang lebih tinggi (104,54%) dibandingkan dengan Kabupaten Padang Panjang (100,26%). Selain itu, Kabupaten Magelang juga mencatat surplus pada tahun 2020, sementara Kabupaten Padang Panjang mengalami defisit. Oleh karena itu, dari laporan yang ada, Kabupaten Magelang memiliki kinerja keuangan dan kinerja anggaran yang lebih baik daripada Kabupaten Padang Panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kinerja keuangan antara Kabupaten Padang Panjang dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dengan rasio realisasi pendapatan yang lebih tinggi dan mencatat surplus pada tahun 2020, sementara Kabupaten Padang Panjang mengalami defisit. Kabupaten Magelang memiliki kinerja keuangan dan kinerja anggaran yang lebih baik daripada Kabupaten Padang Panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, S., & Afrah Junita. (2020). *Memahami Hubungan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah, dalam Isu Kontemporer Akuntansi Publik. Edisi 1. Seri Bungan Rampai Akuntansi Publik.* (A. S. & R. P. S. Harnovinsyah, Ed.; Edisi 1). Unitomo Press.
- JURNAL+RISET+AKUNTANSI-++VOL.+1+NO.+2+MEI+2023+Hal+212-222.* (n.d.).
- Johnson, B., et al. (2020). *Enhancing Transparency and Accountability through Comparative Financial Performance Analysis: A Case Study.* Public Administration Review.
- Padang panjang-lamp. Perda no. 8 th 2019.* (n.d.).
- Syukriy Abdullah, Darwanis, Endra Gunawan, & Syukur Selamat Karo-Karo. (2020). *Akuntabilitas Anggaran Bencana Pada Pemerintah Daerah: Akualisasi, Partisipasi, dan Politisasi. Dinamika Akuntansi di Masa Krisis. Volume 1. Book Series: Perkembangan Kontemporer Akuntansi di Indonesia.: Vol. Volume 1* (R. M. M. I. D. S. & H. I. Heru Fahlevi, Ed.).
- Smith, A., et al. (2021). *The Importance of Financial Performance Analysis in Local Government: A Comparative Study.* Journal of Public Finance.